Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PERAN NEGARA DALAM TRANSFORMASI DESA: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN WADAS TERHADAP STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT DESA WADAS DI KABUPATEN PURWOREJO

Dewi Setiawati, Hendi Irawan S.Pd., M.Kesos

[1,2] *Universitas Indraprasta PGRI*

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

dewistwt6@gmail.com
siti_khadijah@unismabekasi.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak kebijakan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan tersebut memengaruhi hubungan antara negara dan warga, memunculkan pro dan kontra di masyarakat, serta mengubah struktur sosial desa yang selama ini bertumpu pada sektor agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bendungan tidak hanya dipandang sebagai upaya modernisasi dan pemerataan pembangunan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik pembebasan lahan, perbedaan kepentingan, dampak lingkungan, dan hilangnya mata pencaharian warga. Kesimpulannya, pembangunan berskala besar perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, serta memperhatikan hak dan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan.

Kata kunci: Bendungan Bener, Desa Wadas, konflik sosial, pembangunan, struktur sosial.

ABSTARCT

This study examines the impact of the Bener Dam development policy in Wadas Village on the social life of the local community. It aims to understand how this policy affects relations between the state and residents, triggers support and opposition within the community, and changes the village's social structure, which has traditionally depended on agriculture. This research uses a qualitative method with a literature review approach based on relevant academic sources. The findings show that the dam project is seen not only as a form of modernization and more even development, but also as a source of social problems, including land acquisition conflict, differing interests, environmental concerns, and the loss of livelihoods for local residents. The study concludes that large-scale development should be carried out with good communication, transparency, and careful attention to the rights and social conditions of the community to avoid prolonged tension.

Keywords: Bener Dam, Wadas Village, social conflict, development, social structure.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meratakan proses pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memiliki implementasi pada tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 (Sujadi, 2018 dalam (Lusi dan Dwi, 2023)). Bendungan Bener di Desa Wadas masuk ke dalam PSN nomor 134 dan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasionalpada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (Erry, 2024).

Proses pembangunanya telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 dan memiliki target selesai akhir Desember 2024 (Erry, 2024 dalam Widtoko, 2023). Dalam proses pengadaan infrastruktur untuk pembangunan kepentingan umum dibutuhkan lahan pengadaan tanah yang sudah tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UU RI Nomor 2 Tahun 2012 yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi atau kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak (Erry, 2024). Penetapan lokasi Bendungan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 570/41 Tahun 2018 mengenai Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener.. dengan 4 desa sebagai wilayah akses jalan dalam proses pembangunan yaitu Desa Wadas, Desa Kedung Loteng, Desa Karangsari, dan Desa Guntur. Pemerintah memiliki harapan dalam pembangunan Bendungan ini supaya dapat menanggulangi beberapa masalah di masyarakat pedesaan, seperti masalah keekringan dan banjir. Bendungan bener juga diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dengan menjadikanya sebagai pengairan irigasi seluas 15.519 hektar dan suplai air baku sebesar 1.500 liter/detik di wilayah Kabupaten Purworejo, kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulonprogo (Cahya, Fiqhi Purnama dkk). Bendungan Bener ini akan difungsikan sebagai bendungan yang tertinggi di pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara dengan capaian tinggi sebesar 150 meter (Rooza, 2022).

Keberadaan proyek ini menimbulkan Pro dan Kontra dari pihak masyarakat terkait pembebasan lahan dan juga efek domino dari perubahan lingkungan di sekitar wilayah ini. Termasuk dalam mata pencaharian yang dilakukan masyarakat di desa Wadas bersumber pada bidang agraris. Muncul konflik baru dari adanya warga sebagai pemilik tanah tidak menerima aspek yang dibutuhkan dalam proses pembebasan tanah termasuk pada hal terkait kompensasi pembebasan tanah (Harland, M Priyatman dkk, 2022 dalam (Pujiriyani et al., 2014)). Muncul serangkaian aksi protes yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara warga dengan aparat. Dengan tujuan aksi berupa

penolakan Proyek Pembangunan Bendungan dan penambangan batu andesit untuk pembangunan bendungan (Harland, M Priyatman dkk, 2022 dalam (Wardana, 2022)).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aktor negara mengartikulasikan Proyek Startegis Nasional Bendungan dalam proses pembebasan lahan di Desa Wadas serta pengaruhnya terhadap relasi negara-masyarakat?
2. Bagaimana dampak kebijakan pembangunan Bendungan Wadas terhadap keretakan atau solidaritas sosial antara yang pro dan kontra pada warga Desa Wadas?
3. Bagaimana peralihan dari masyarakat berbasis agraris menjadi kelompok yang kehilangan lahan mempengaruhi struktur sosial warga Desa Wadas?

C. Tinjauan Penulisan

1. Menganalisis pemahaman dan pengaruhnya antara relasi kuasa dengan masyarakat pada Proyek Starategis Nasional Bendungan Bener desa Wadas.
2. Menganalisis dampak dari kebijakan Pembangunan Bendungan di Desa Wadas terhadap keretakan atau solidaritas sosial antara yang pro dan kontra pada warga Desa Wadas.
3. Menganalisis pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat pada peralihan dari masyarakat berbasis agraris menjadi kelompok yang kehilangan lahan.

D. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan berkaitan dengan Pembangunan Strategis Nasional (PSN) kebijakan pembangunan sering didasarkan oleh harapan untuk menjadikan wilayah suatu desa menjadi wilayah yang modern dan memiliki infrastruktur yang memadai bagi berkembangnya keadaan desa. Dalam pelaksanaanya modernitas memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Kelemahan atau dampak yang ditimbulkan bercermin pada masyarakat desa tersebut apakah menimbulkan pro dan kontra. Dilihat pada kasus Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas ini banyak masyarakat yang melawan dan tidak setuju dengan program yang dilaksanakan karena berakibat menimbulkan permasalahan ekologis dan juga tidak adanya unsur yang memenuhi dalam proses alih fungsi lahan dan kompensasi. Timbullah konflik sosial yang ada di masyarakat sehingga memerlukan Teori Konflik yang disediakan oleh Karl Dehundruft.

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode studi literatur. Tujuan dari pemilihan metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi kuasa dan struktur sosial pada pembangunan melalui analisis dalam berbagai teks dan dokumen ilmiah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

B. Pendektan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, dengan mengacu pada prespektif Sosiologi Pembangunan untuk menganalisis relasi kuasa dan masyarakat desa, struktur sosial masyarakat desa, dan dampak dari kebijakan pembangunan tersebut.

C. Sumber Data

Data yang digunakan pada penulisan ini menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui literatur ilmiah yang relevan, berupa Jurnal ilmiah yang cakupan bahasanya mengenai Pembangunan Bendungan Bener desa Wadas.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian dengan menggunakan **Teori Konflik** untuk menyoroti ketimpangan relasi kuasa antara negara/perusahaan dan warga lokal, serta konflik kepentingan. Kemudian menggunakan **Teori Modernitas** guna melihat apakah pembangunan yang dilakukan menjadi sebuah kemajuan atau hanya menghancurkan tatanan sosial tradisional. Dan menggunakan **Teori Politik Ekologi** untuk melihat keadaan politik, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang terdampak.

PEMBAHASAN

Suatu pelaksanaan pembangunan dibutuhkan dukungan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik itu pemangku kebijakan, pihak masyarakat yang terdampak, dan pihak ketiga yang memiliki andil dalam sebuah pembangunan. Dalam proses pembangunan Bendungan Bener desa Wadas di kabupaten Purworejo ini, polemik yang terkandung cukup kompleks, dan saling berkaitan. Pembangunan Bendungan ini menjadi bagian dari Pembangunan Strategis Nasional (PSN) jangka panjang dari pemerintah pusat dan daerah. Dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkanya, sehingga realisasi harus dilaksanakan. Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas menjadi sebuah modernisasi dengan memiliki tujuan pada infrastruktur sebagai penggerak diruang baru (Agung, 2022). Melalui adanya pembangunan Bendungan Bener diharapkan bisa meningkatkan jumlah panen di area irigasi (Aura dkk, 2024). Menurut Teori Modernitas *(Modernization Theory)* pada pembangunan suatu infratsruktur berupa Bendungan menjadi sebuah simbol dari kemajuan termasuk di wilayah desa. sehingga adanya pemerataan pembangunan tidak hanya di wilayah kota (Fihqi dkk, dalam Fellman dan Getis dalam Muttaqin (2014)).

Proyek Bendungan Bener melibatkan beberapa desa di wilayah tersebut, salah satunya Desa Wadas. Proyek ini akan membuat Bendungan sekaligus penggalian bahan tambang batu andesit di Desa Wadas sebagai bahan material dalam proses pembangunan. Sementara di Desa Wadas sendiri masyarakatnya kebanyakan hidup bergantung pada bidang agraris. Menurut data masyarakat Desa Wadas perekonomianya ditunjang oleh hasil alam berupa hasil bumi dari beberapa jenis tanaman seperti Akasia, Kelapa, Keling, Mahoni, Aren, Karet, Kapulaga, Jati, Cabai, Kemukus, Durian, Petai, Vanili,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Cengkeh. Sengon, dan Pisang (Lusi dan Dwi, 2023). Masyarakat beranggapan bahwa pembangunan ini mengakibatkan mata pencaharian mereka berkurang. Karena lahan masyarakat yang terdampak pada pembangunan bendungan membuat hilangnya mata pencaharian warga Desa Wadas yang berupa hasil alam tadi (Aura dkk, 2024). Hal ini menimbulkan munculnya teori konflik kepentingan pada masyarakat yang melakukan penolakan pembangunan.

Menurut Aura dkk, 2024 dalam Putri dkk, 2023 teori konflik yang bersinggungan dengan Pembangunan Bendungan Bener Desa Wadas memberikan gambaran mengenai masyarakat yang terbagi dalam beberapa kelompok berbeda pada kepentingannya. Kepentingan sendiri bisa dikuasai oleh salah satu pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengambil atau merusak dari pihak lawan atau yang bersebrangan. Pada persoalan yang terjadi disini adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat berkaitan dengan dampak ekologis dari penambangan batu andesit, dampak dari masyarakat yang tanahnya harus mendapat kompensasi, dan dampak secara nyata dari warga yang kehilangan mata pencaharianya. Konflik tersebut juga memberikan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan membuat sebuah gerakan protes yang terjadi di Desa Wadas dari masyarakat setempat. Menurut Mustain Mashud terkait konflik yang ada di negara berkembang, mengatakan bahwa kesenjangan ekonomi yang tajam justru menjadi faktor pemicu munculnya kekacauan sosial dari gerakan protes, pertikaian dan konflik kelas yang sulit dikendalikan.

Protes di Desa Wadas mencuat dengan gerakan yang dilakukan di depan para pemangku kebijakan dan aparat. Menurut teori konflik sosial munculnya protes bisa terjadi karena adanya ketidakadilan akses terhadap sumber daya dan peluang (Dewi dkk, 2024).

Berbanding dengan *Theory Political Ekology*, teori ini lebih melihat aspek berupa politik, ekonomi, dan dampak lingkunganya. Sejalan dengan masyarakat desa Wadas menganggap bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah ini tidak dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dari data AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) mengatakan bahwa penambangan batu andesit di Desa Wadas ini memberikan dampak lingkungan yang cukup serius di wilayah tersebut. Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan merasa bahwa pembangunan ini akan mencemari lingkungan dan merusak sumber daya air mereka.Masyarakat desa Wadas juga membentuk Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dibuat berkaitan dengan proyek bendungan bener di Desa Wadas bahwa pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan memiliki badan hukum yang jelas memiliki andil yang lebih baik untuk melihat keadaan masyarakat dalam terlebih dahulu dalam proses pembangunan suatu infrastruktur yang ada disebuah desa. Pemerintah belum melihat aspirasi masyarakat dan juga perhitungan matang. Terkait analisis dampak lingkungan yang terjadi pada sebuah proyek berskala nasional ini justru menimbulkan gesekan dan konflik di masyarakat terkait pro dan kontra adanya pembangunan ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebelum melaksanakan proyek pembangunan berskala besar. Aspirasi dan pendapat masyarakat perlu didengarkan serta dijadikan pertimbangan agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Selain itu, proses pembebasan lahan perlu dilakukan secara terbuka, adil, dan disertai pemberian kompensasi yang layak kepada warga terdampak sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin dengan baik. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin muncul dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara lebih mendalam dan melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya. Bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, maupun penyediaan pekerjaan alternatif agar kehidupan mereka tetap dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tetap menyampaikan pendapat dan aspirasi secara damai sehingga dapat tercipta solusi bersama tanpa menimbulkan konflik yang merugikan berbagai pihak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan melalui observasi langsung di lapangan agar memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat Desa Wadas setelah adanya pembangunan Bendungan Bener.

DAFTAR PUSTAKA

ANGGRAINI, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie*, *1*(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197

Fatimah, K. A., Dewi, S. S., Awalinda, A., & Niswati, K. (2024). Dinamika Konflik PembangunanBendungan Bener di Desa Wadas. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *1*(4), 1–12.

Minal Ardi. (2012). Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar. *Jurnal Eksos*, *8*(1), 61–72. http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359

Mustain, M. (2010). *Sosiologi Pembangunan*. *In: Sosiologi Pembangunan dan Teori Pendekatannya*. *1*, 1–38. http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4644

Nathasya, H. (2024). No TitleΕΛΕΝΗ. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(1), 70–80.

Pariyatman, M. H., Santoso, P., Madjid, A., Wadas, K., Resolusi, A., Wadas, K., Perspektif, D., & Rekognisi, T. (2022). FORM JK-4 RESPEK DAN REKOGNISI : RESOLUSI KONFLIK WADAS (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth) sebagai lahan pertambangan menjadi 3 isu konflik Wadas ini dari kacamata Teori kontemporer , Axel Honneth (1995). A. *Jurnal Komunikatio*, *8*, 116–127.

Purnama, F. C., Rasalwati, U. H., & Sudrajat, A. (n.d.). *Dampak Sosial Pembangunan Bendungan Bener Terhadap Masyarakat di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo*. 177–188.

Ansari, Lusi dan Dwi Harsono. (2023). *WADAS KABUPATEN PURWOREJO THE CONFLICT DYNAMICS IN THE CONSTRUCTION OF THE BENER DAM IN WADAS Pelaksanaan proyek ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor dilakukan p*. *08*(June).

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*(November), 306–312.

Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(1), 1–41. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41